

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Anselm Strauss & Juliet Corbin, 2003, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif: Tatalangkah dan Teknik-Teknik Teorisasi Data*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.
- Bambang Eko Suryadi, 2013. *Hukum Agraria Kehutanan: Aspek Hukum Pertanahan Dalam Pengelolaan Hutan Negara*. Depok: Rajawali Pers.
- Boedi Harsono. 2008. *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan.
- Buku Statistik Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022, 2022, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta, Yogyakarta.
- Farida Nugrahani, 2014. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Solo: Cakra Books.
- Dwi Wulan Pujriyani dan Ageliyah Juliani, “Pengembangan Reforma Agraria Berbasis Potensi di Desa Kanigoro Kecamatan Saptosari Kabupaten Gunungkidul”, 2021, *Pengembangan Reforma Agraria Gunungkidul*, STPN Press, Yogyakarta.
- Mochammad Tauchid, 2009, *Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia*, STPN Press, Yogyakarta.
- Messer, N dan P. Townsley. 2003. *Local Institutions and Livelihoods: Guideline for Analysis*. FAO. Rome.
- R. W. Prodjosoeardo, 1950, *Buku Pegangan Pamong Pradja Daerah Istimewa Jogjakarta*, Djawatan Pradja Daerah Istimewa Jogjakarta, Yogyakarta.
- Rohadi D, Herawati T, Padoch C, race D. 2015. *Mendorong Usaha Tanaman Kayu Sebagai Bisnis Yang Menarik Bagi Petani*. Indobrief CIFOR.
- Subadi. 2010. *Penguasaan dan Penggunaan Tanah Dalam Kawasan Hutan*, Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.
- Sugiyono, 2017. *Metode Penelitian Kebijakan*. Bandung: Alfabeta.
- \_\_\_\_\_, 2021. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Uhar Suharsaputra, 2018, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan Tindakan*, Bandung: Refika Aditama.
- V. Wiratna Sujarweni, 2020. *Metodologi Penelitian*. Bantul. Pustaka Baru.
- Wiradi, G & Makali, 2014. *Penguasaan Tanah dan Kelembagaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

## **Tulisan Ilmiah**

- Alhafi, Azwar Najib, Lubabun Ni'am, dan Muchammad Chanif Chamdani, 2020, *Konflik di dalam Kawasan Hutan Banyuwangi: Tipologi dan Peluang Penyelesaiannya*, Laporan Penelitian, Perkumpulan ARuPA.
- Dwiwansany, Wardhani, Shenita. 2019. *Sistem Pertanahan Keraton Yogyakarta Sebagai Daerah Otonomi Khusus*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Program Studi Magister Ilmu Hukum Volume 1, Nomor 2, Tahun 2019.
- Farida, P. 2011. *Penegasan Alasan Hak Penguasaan Fisik Turun Temurun Dalam Praktik Pendaftaran Tanah*. Jurnal Amanagapna. Vol. 19. No. 4.
- Fisher, Micah R., Ahmad Dhiaulhaq, Muhammad Alif K. Sahide, 2019. *The Politics, Economies, And Ecologies Of Indonesia's Third Generation Of Social Forestry: An introduction to the special section, Forest and Society*, Vol. 3 (1).
- Galudra, G. 2010. *Assessment dan Analisis Tenurial untuk Mendukung Pengelolaan Hutan yang Berkelanjutan, Khususnya bagi KPH dalam Konteks REDD*. Bogor.
- Lehdonvirta, V., Oksanen, A., Räsänen, P., & Blank, G. (2021). Social Media, Web, and Panel Surveys: Using Non-Probability Samples in Social and Policy Research. *Policy and Internet*, 13 (1), 134–155. <https://doi.org/10.1002/poi3.238>.
- Muhajir, Mumu. 2015. *Satu Tahun Perber 4 Menteri tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah di Dalam Kawasan Hutan: Kendala, Capaian dan Arah ke Depan*. Policy Brief Epistema Institute, Vol. 2, 2015.
- Pawar KV, Rothkar RV. 2015. *Forest conservation dan environmental awareness. Procedia Earth and Planetary Science*. 11: 212-215
- Salim, M.N, Pinuji, S, Utami, W. 2018. *Reforma Agraria Di Kawasan Hutan Sungaitohor, Riau: Pengelolaan Perhutanan Sosial Di Wilayah Perbatasan*. Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan, vol. 4, 2, halaman 164-189.
- Sinabutar, Pernando, Bramasto Nugroho, Hariadi Kartodihardjo, Dudung Darusman., 2015. *Kepastian Hukum dan Pengakuan Para Pihak Hasil Pengukuhan Kawasan Hutan Negara di Provinsi Riau*, Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan, Vol. 12, No.1, April 2015.
- Soraya Isfandiari, 2021, *Pengambilan Keputusan Penyelesaian Permasalahan Tanah Dalam Kawasan Hutan Di Daerah Istimewa Yogyakarta*. Disertasi. Program Doktorat Manajemen Dan Kebijakan Publik, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Sunderlin, William D., Sonya Dewi, dan Atie Puntodewo. *Poverty and forests: multi-country analysis of spatial association and proposed policy solutions*. Bogor: CIFOR. 2008.

Utomo EWB, Widiatmaka, Rusdiana O. 2021. *Potensi Lahan Tersedia Untuk Pengembangan Hutan Rakyat Di Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I. Yogyakarta*. JPSL 11 (1): 108-119.

Zuni Hermawan, 2011, *Motivasi Masyarakat Untuk Mengelola Hutan Ab (Afkiren Bosch) di Desa Jetis Kecamatan Saptosari Kabupaten Gunung Kidul Provinsi D.I. Yogyakarta*, Skripsi, Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada.

### **Publikasi Resmi Dari Institusi**

Badan Pusat Statistik, 2022, *Kabupaten Gunungkidul Dalam Angka 2022*, Jakarta: Badan Pusat Statistik.

Badan Pusat Statistik, 2022, *Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Angka 2022*, Jakarta: Badan Pusat Statistik.

Badan Pusat Statistik, 2022, *Statistik Indonesia 2022*, Jakarta: Badan Pusat Statistik.

Konsorsium Pembaruan Agraria. Catatan Akhir Tahun 2019 Konsorsium Pembaruan Agraria dari Aceh Sampai Papua Urgensi Penyelesaian Konflik Agraria Struktural dan Jalan Pembaruan Agraria ke Depan. Jakarta: Konsorsium Pembaruan Agraria. 2019.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2021, *Statistik 2020 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan*, Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 45/PUU-IX/2011 tentang Uji Materi Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Subbagian Data dan Infomasi, Bagian Program dan Evaluasi, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, 2016. *Statistik Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2015*. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasinal Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024.